

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi advokasi transnasional yang dilakukan oleh Aliansi DtZ dalam mengeliminasi CST di Thailand menunjukkan keberhasilan yang signifikan melalui berbagai pendekatan dan mekanisme yang kompleks. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan upaya di tingkat domestik, tetapi juga memanfaatkan kekuatan jaringan internasional dan mekanisme diplomasi global untuk memobilisasi tekanan eksternal terhadap Pemerintah Thailand, terutama ketika saluran kebijakan dan hukum domestik mengalami hambatan yang cukup besar. Dalam konteks ini, penerapan model *boomerang pattern* yang dikembangkan oleh Keck dan Sikkink menjadi kerangka analisis utama yang menggambarkan bagaimana aktor-aktor non-negara mampu memengaruhi perubahan kebijakan di tingkat nasional.

Strategi advokasi DtZ melibatkan empat komponen utama: *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Dalam aspek *information politics*, DtZ secara aktif mengumpulkan dan menyebarkan data terkait CST, yang digunakan untuk mendukung advokasi dan mendorong pemerintah Thailand untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dengan baik dapat meningkatkan kesadaran publik dan mendorong tindakan yang lebih tegas dari pemerintah.

Selanjutnya, dalam aspek *symbolic politics*, DtZ berhasil membangun empati publik terhadap isu CST melalui kampanye multimedia dan pameran seni. Kegiatan ini memberikan wajah manusia pada statistik yang sering kali dianggap kering dan tidak menarik. Dengan menampilkan kisah nyata dari korban, DtZ mampu menarik perhatian media dan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan untuk tindakan yang lebih tegas dalam menangani CST. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan simbolis ini sangat efektif dalam menciptakan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku di kalangan masyarakat, serta menggerakkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk sektor swasta dan pemerintah.

Dalam konteks *leverage politics*, DtZ membangun kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi, tokoh publik, dan organisasi internasional untuk menciptakan tekanan pada Pemerintah Thailand. Dukungan dari tokoh berpengaruh seperti Dr. Najat Maalla Mjid memberikan legitimasi tambahan bagi upaya DtZ. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan tokoh ini tidak hanya meningkatkan visibilitas isu CST, tetapi juga mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam menangani masalah ini. Dengan memanfaatkan jaringan internasional, DtZ berhasil menciptakan tekanan yang signifikan pada Pemerintah Thailand untuk memperbaiki kebijakan dan praktik perlindungan anak.

Keempat, dalam aspek *accountability politics*, DtZ mendorong akuntabilitas melalui advokasi hukum dan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum. Penelitian ini menemukan bahwa upaya DtZ dalam melatih aparat

penegak hukum dan mengembangkan sistem pemantauan kasus telah menghasilkan peningkatan dalam jumlah kasus yang ditangani dan pelaku yang dihukum. Dengan menciptakan mekanisme akuntabilitas yang jelas, DtZ berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa advokasi yang efektif tidak hanya berfokus pada perubahan kebijakan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Sebagai hasil dari strategi advokasi yang diterapkan, Pemerintah Thailand telah melakukan reformasi kebijakan yang signifikan. Ini termasuk amandemen Undang-Undang *Anti-Trafficking* yang memperberat hukuman bagi pelaku CST, pembentukan satuan tugas khusus seperti Thailand Internet Crimes Against Children (TICAC), dan peningkatan layanan rehabilitasi bagi korban. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, pemerintah Thailand berhasil mengidentifikasi 640 korban perdagangan manusia dan meningkatkan jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini tidak hanya merupakan hasil dari tekanan internasional, tetapi juga merupakan refleksi dari komitmen pemerintah Thailand untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual.

Meskipun ada kemajuan yang dicapai, tantangan struktural tetap ada. Korupsi di tingkat lokal, kolusi antara aparat penegak hukum dan jaringan CST, serta kesulitan dalam mengakses data yang akurat menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Penelitian ini menemukan bahwa pandemi Covid-19 juga telah

memperburuk situasi dengan peningkatan kasus eksploitasi seksual anak secara online. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak di Thailand.

Secara keseluruhan, DtZ telah berhasil menerapkan strategi advokasi transnasional yang efektif dalam upaya mengeliminasi CST di Thailand. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, DtZ tidak hanya berhasil mendorong perubahan kebijakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu CST. Komitmen DtZ untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual menunjukkan bahwa advokasi transnasional dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak, serta perlunya upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang masih ada dalam penanganan CST di Thailand.

4.2 Saran

Penelitian ini telah mengidentifikasi keberhasilan strategi advokasi transnasional yang dilakukan oleh aliansi DtZ dalam mengeliminasi CST di Thailand. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian lebih mendalam dilakukan dengan memperluas objek studi ke organisasi lain yang juga berfokus pada isu perlindungan anak di berbagai negara. Analisis perbandingan antara strategi yang diterapkan oleh berbagai organisasi dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai efektivitas pendekatan yang berbeda dalam advokasi. Selain

itu, penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan dampak kebijakan yang dihasilkan dari advokasi ini dari perspektif sosial dan ekonomi, seperti efek terhadap kesejahteraan anak, peningkatan kesadaran masyarakat, dan dampak pada sektor pariwisata. Kajian berbasis data kuantitatif yang lebih rinci mengenai perubahan dalam angka eksploitasi anak dan respons masyarakat terhadap kampanye advokasi juga dapat melengkapi analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Terakhir, penelitian lebih lanjut mengenai respons pemerintah Thailand dan komunitas internasional terhadap kebijakan yang dihasilkan dari advokasi DtZ dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika perlindungan anak dan kerja sama internasional dalam isu ini.